Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

Nurhilmiyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: nurhilmiyah@umsu.ac.id

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Di dalam era perekonomian modern sekarang ini, perkembangan industri keuangan nonbank mengalami kemajuan pesat, yang ditandai dengan munculnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat menjadi LPMUBTI atau lazim disebut masyarakat sebagai *fintech peer-to-peer lending* (*fintech lending*). Permasalahannya, OJK dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 UU OJK tidak sampai mengakomodasi pembatasan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya. Pengaturan mengenai hal tersebut diserahkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Akibat ketiadaan pembatasan ini, memberikan peluang bagi LPMUBTI untuk menerapkan bunga pinjaman dan biaya lainnya secara maksimal dan tidak transparan, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar dari perlindungan pengguna khususnya transparansi dan perlakuan adil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Kata kunci: Kewenangan, OJK, pembatasan, besaran bunga pinjaman, biaya lainnya, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi

Pendahuluan

Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman tunai tidak semata-mata mengharapkan kucuran dana dari perbankan. Seiring perkembangan perekonomian digital dan teknologi informasi, lahirlah *fintech* atau *financial technology*. *Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Pada akhir tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi mengenai *fintech* ini melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. *Fintech* bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu. Sedangkan *fintech peer-to-peer lending* (istilah berbahasa Inggris) terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja (FAQ *Fintech Lending* OJK, tanpa tahun). Makalah ini menggunakan istilah yang dicantumkan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, yang disingkat menjadi LPMUBTI. Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan asosiasi para penyelenggara LPMUBTI di Indonesia memiliki kewenangan dalam menentukan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya. Berdasarkan *Code of Conduct* dari AFPI, besaran bunga pinjaman yang

diberikan kepada debitur sebesar 0,8% per harinya (batas maksimum). Ditambah adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Sayangnya, pada tataran implementasi tak sedikit LPMUBTI yang menerapkan besaran bunga pinjaman di atas ketentuan yang telah ditetapkan AFPI. Hal inilah yang menimbulkan persoalan bagi masyarakat pengguna LPMUBTI. Secara yuridis ketidakpatuhan para oknum penyelenggara LPMUBTI pada penerapan besaran bunga pinjaman, berlawanan dengan prinsip dasar perlindungan pengguna yang termaktub di dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 29 yang terdiri dari a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data; dan e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk dikaji, bagaimana kewenangan OJK dalam pembatasan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. (Marzuki, 2009). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab dan mencari pemecahan masalah terkait tidak adanya pembatasan besaran bunga pinjaman dalam kewenangan OJK. Sehingga memberikan peluang bagi LPMUBTI untuk menerapkan besaran bunga pinjaman secara subjektif dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan sebab hanya dicantumkan di dalam butir kode etik AFPI. OJK menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi *Fintech Lending* di Indonesia. Penunjukan dilakukan melalui surat S5/D.05/2019 tanggal 17 Januari 2019. Pada tanggal 8 Maret 2019 dilakukan peresmian AFPI oleh OJK.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan penelusuran literatur yang peneliti lakukan mengenai topik riset sejenis, Beberapa peneliti sebelumnya membahas peran dan fungsi OJK, salah satunya mengangkat isu hukum tentang kekosongan norma penentuan bunga pinjaman *financial technology peer-to-peer lending*. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam *financial technology* di dalam perjanjian *peer-to-peer lending*. Serta mempertanyakan lembaga yang berwenang menentukan besaran bunga pinjaman *Fintech* berbasis *peer-to-peer lending* yang ditetapkan bagi debitur. Hasil dari penelitian tersebut, perlindungan hukum bagi debitur berupa regulasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu OJK. Dan OJK harus mengedepankan asas umum yang mengutamakan kepentingan umum. OJK harus membuat peraturan yang menetapkan batasan suku bunga pinjaman *fintech peer-to-peer lending* yang dituangkan dalam peraturan OJK. (Tjandra, 2020). Terdapat sejumlah perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti laksanakan saat ini. Pertama, di penelitian ini penulis menggunakan frase LPMUBTI untuk menggantikan istilah asing *fintech peer-to-peer lending*. Sebab singkatan ini pula yang diundangkan oleh OJK dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Sudah seharusnya membiasakan istilah ini dalam penelitian dan publikasi ilmiah daripada istilah asing.

Kedua, dalam penelitian sebelumnya digunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Sementara menurut peneliti sebaiknya fokus pada satu jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual. Ketiga, peneliti secara tegas mencantumkan pada judul makalah ini perihal kewenangan OJK dalam pembatasan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya pada LPMUBTI. Jadi tidak mempertanyakan lagi lembaga mana yang semestinya mengatur tentang besaran bunga pinjaman pada LPMUBTI. Keempat, peneliti juga menambahkan penjelasan tentang “biaya lainnya” selain bunga pinjaman, yang kerap secara otomatis dibebankan LPMUBTI kepada debitur. Jadi tidak sebatas pada besaran bunga pinjamannya saja. Perbedaan yang terakhir adalah, peneliti menyoroti ketidaksesuaian besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya dengan prinsip dasar perlindungan pengguna khususnya prinsip transparansi dan perlakuan yang adil sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sementara peneliti sebelumnya menyarankan agar OJK mengedepankan prinsip umum yang mengedepankan kepentingan umum. Kewenangan OJK diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK berwenang mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan bank, yang meliputi perizinan untuk pendirian bank; pembukaan kantor bank; anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Selain itu meliputi pula kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum; batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*), dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan antipencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan dan pemeriksaan bank. Kewenangan di Pasal 7 ini tidak berkaitan dengan kewenangan dalam Industri Keuangan NonBank (IKBN) sebagaimana yang diatur oleh OJK. Jadi Pasal 7 wewenang OJK khusus untuk sektor perbankan.

Adapun wewenang OJK terkait melaksanakan tugas pengaturan, di dalam Pasal 8 dicantumkan bahwa OJK berwenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu; menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur; serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kewenangan OJK yang terdapat pada Pasal 8, yaitu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Contohnya dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kewenangan berikutnya yaitu menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, bisa ditafsirkan termasuk industri keuangan nonbank, LPMUBTI. Di sinilah mestinya OJK mengeluarkan pula regulasi terkait tentang pembatasan besaran bunga pinjaman kredit dan biaya lainnya pada LPMUBTI. Jadi tidak diserahkan begitu saja pada AFPI dan menyetujui adanya biaya lainnya di luar bunga. Biaya lainnya ini pada faktanya terdiri dari biaya administrasi dan denda keterlambatan. Denda keterlambatan tidak ada pembatasannya dalam satu hari leterlambatan, AFPI menentukan

“...jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman.” Sehingga tidak heran jika pengembalian dana pinjaman yang harus dibayar pengguna amat sangat besar dan kerap disebut merugikan pengguna. Biaya administrasi di sini bisa disamakan dengan biaya provisi pada proses pengajuan pinjaman dengan agunan di perbankan. Namun sangat disayangkan biaya lainnya ini tidak ada pengaturannya oleh OJK maupun AFPI. Dengan menggunakan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), mengenai penentuan besaran pinjaman bunga dan biaya lainnya tersebut diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Di sisi lain Pasal 36 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 memuat mengenai perjanjian baku yang dibuat antara penyelenggara (LPMUBTI) dan pengguna. Meskipun tetap diarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Menurut Pasal 1767 KUHPer, penetapan bunga dibagi menjadi 2 yaitu yang ditetapkan karena menurut Undang-Undang, bunga yang ditetapkan karena adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Besaran bunga pinjaman harus dinyatakan secara tertulis di dalam perjanjian tersebut. Besaran bunga tersebut diperbolehkan melampaui besaran bunga menurut Undang-Undang sepanjang bukan untuk hal yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang. Jika penyelenggara LPMUBTI telah memperjanjikan besaran bunga pinjaman dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka debitur (pengguna LPMUBTI) diwajibkan membayar bunga pinjaman menurut Undang-Undang, demikian menurut Pasal 1768 KUHPer. Lalu, buku pembayaran pinjaman pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu apapun mengenai bunga, memberikan persangkaan tentang sudah dibayarnya bunga tersebut, dan debitur dibebaskan dari pinjamannya. (Pasal 1769 KUHPer).

Adapun besaran bunga pinjaman menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 adalah 6%. Mengikuti pada penerapan suku bunga dasar perbankan adalah per tahun, berarti besaran bunga pinjaman diasumsikan sekitar 6% per tahunnya. Jika dibandingkan dengan besaran bunga pinjaman yang ditetapkan AFPI yaitu sebesar 0,8% per hari plus biaya lainnya maksimal 100%, dan tidak dicantumkannya besaran bunga pinjaman pada awal pengguna menandatangani LMPUBTI, maka hal ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan pengguna yang diatur OJK di dalam Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, yaitu prinsip transparansi dan perlakuan adil.

Kewenangan OJK pada Pasal 9 Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Wewenangnya adalah, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; melakukan penunjukan pengelola statuter; menetapkan penggunaan pengelolaan statuter; menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK pada Pasal 9 ini sudah akomodatif terhadap tugas-tugas pengawasan lembaga jasa keuangan di sektor jasa keuangan termasuk LMPUBTI. Seperti wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, idealnya bisa mengatur soal pembatasan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya pada LMPUBTI. Untuk melaksanakan kewenangannya mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan, OJK berwenang melakukan penunjukan pengelola dan penggunaan statuter dalam melaksanakan kewenangannya melindungi pengguna. Menurut peneliti, pengelola statuter ini melaksanakan tugasnya terkait pelaksanaan kebijakan untuk penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan, tidak ada kaitannya untuk melindungi pengguna LPMUBTI.

Kesimpulan

Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sangat besar sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terutama kewenangan yang langsung berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam hal ini pengguna LPMUBTI. Kewenangan yang sangat strategis dari OJK dalam menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya peraturan tentang pembatasan besaran bunga pinjaman beserta biaya lainnya pada LPMUBTI.

Daftar Pustaka

- Antoni Tjandra. (2020). *Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending* (hlm. 90-103). Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Volume 3 Nomor 1.
- Hendro Nugroho. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*. (hlm. 328-334). Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.328-334.
- FAQ Fintech Lending. (tanpa tahun). Otoritas Jasa Keuangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Edisi I. Cetakan VIII. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Penetapan Bunga Pinjaman. (2018) Tim Yuridis.id. <https://yuridis.id/penetapan-bunga-dalam-pinjam-meminjam/> diakses pada 23 Juni 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen